

EDITORIAL

20 April 2019

Pemerintah Tancap Gas

PETA kekuatan partai politik di parlemen untuk periode 2019-2024 mulai tergambar. Setidaknya, demikian yang didapat dari hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Berbeda dengan pemilihan presiden, belum ada satu pun parpol yang meragukan hasil hitung cepat perolehan suara di legislatif kendati yang mengeluarkan ialah lembaga-lembaga yang juga melakukan hitung cepat hasil pilpres.

Sembilan partai lolos ke Senayan, sedangkan tujuh partai lainnya terpental karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Berdasarkan hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia, misalnya PDIP meraih 18,89% suara, Gerindra 12,68%, Golkar 11,80%, PKB 10,14%, NasDem 9,05%, PKS 8,18%, Demokrat 7,63%, PAN 6,56%, dan PPP 4,40%.

Partai-partai baru, yakni Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, Garuda, dan Partai Berkarya gagal mendobrak pintu Senayan dalam upaya pertama. Partai Bulan Bintang dan PKPI pun lagi-lagi terpaksa gigit jari. Praktis

pengisi parlemen masih wajah-wajah lama minus Hanura yang terlempar karena tidak cukup meraih suara untuk bertahan.

Partai Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencatatkan perolehan suara mayoritas. Mereka ialah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Rata-rata lembaga survei menyebutkan raihan total suara yang didapat parpol-parpol koalisi tersebut di atas 53%. Bila dikonversikan ke kursi DPR, penguasaan Partai Koalisi Indonesia Kerja mencapai 60%.

Bila hasil itu sejalan dengan yang ditetapkan KPU pada 22 Mei mendatang, demikian pula dengan hasil hitung cepat pilpres yang menunjukkan kemenangan paslon 01, posisi pemerintah bakal semakin kuat. Pemerintahan RI yang menganut sistem presidensial mendapatkan dukungan yang lebih besar dari fraksi-fraksi di DPR ketimbang pada periode sebelumnya di 2014 hingga 2019.

Kerja pemerintah akan semakin

mulus. Tinggal tancap gas untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Akan tetapi, tidak lantas fraksi-fraksi koalisi pemerintah meloloskan dan menyokong apa pun kebijakan yang disodorkan pemerintah untuk disetujui. Mereka seyogianya tetap memainkan peran pengawasan secara ketat agar jalannya pemerintahan tidak melencong dari cita-cita konstitusi.

Di sisi lain, partai-partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang berkomposisi Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN, diharapkan bertaring dalam memainkan peran sebagai oposisi. Dengan raihan suara rata-rata di atas 35%, berdasarkan hasil hitung cepat, koalisi oposisi masih cukup kuat menggerakkan kebijakan pemerintah bila salah arah. Itu idealnya.

Koalisi partai oposisi perlu menyodorkan kritik konstruktif, bukan menyoal dengan motif menjatuhkan kinerja pemerintah. Saling mengawasi, saling mengoreksi, dan saling memberi saran akan membuat pembangunan Indonesia kian berdaya hasil dengan kesejahteraan yang merata dan keadilan bagi seluruh rakyat. Bukankah ini yang kita cita-citakan bersama?

Dukungan signifikan dari parlemen selama lima tahun ke depan diharapkan mampu menjadikan pemerintahan jauh lebih efektif. Pemerintah bisa bergerak cepat untuk mengambil kebijakan yang berorientasi aspirasi dan kepentingan rakyat tanpa hambatan berarti dari lembaga legislatif. Fraksi-fraksi pendukung pemerintah hendaknya belajar banyak dari pengalaman selama ini. Jangan sekali-kali di parlemen bertindak melebihi oposisi, sedangkan kadernya masih tetap dipertahankan di kabinet. Jika itu yang terjadi, berarti menabrak batas-batas kepatutan dalam berpolitik.

Seiring dengan itu, parpol memiliki tugas lain yang tidak kalah berat jika dibandingkan dengan menggenjot kinerja parlemen. Tidak bisa dimungkiri nama partai politik tidak begitu harum di mata rakyat dengan masih banyaknya anggota legislatif yang korupsi. Bersih-bersih di internal parpol mesti terus digalakkan hingga antikorupsi membudaya dan mendarah daging.

Pemilu serentak antara pilpres dan pemilu legislatif disebut berhasil jika menghasilkan pemerintahan efektif. Disebut efektif karena presiden mendapat dukungan kuat dari parlemen.



DUTA

OPINI PUBLIK

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Saatnya Merekatkan kembali Perbedaan** (20-27 April 2019) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Pemilu sejatinya akan menghasilkan siapa yang dipercaya rakyat untuk memimpin negeri ini. Kalau ada yang tak dipercaya, bukan berarti dia tak mampu memimpin. Para kandidat ialah putra-putra terbaik bangsa. Kita harus menerima apa pun hasil akhirnya kelak. Berikut komentar pembaca.

Menghormati Proses, Mendahulukan Persatuan

PESTA demokrasi puncak sudah tergelar 17 April lalu. Akan tetapi, masih ada tahapan hingga nanti penetapan secara sah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Tahapan demi tahapan pemilihan dalam setiap momentum pemilu tak pernah sepi dari perbedaan pandangan, baik tentang hasil pemilihan maupun aturan main yang ditentukan dalam proses pemilihan. Semua itu menjadi realitas yang lazim dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Keputusan akhir KPU akan menentukan pemimpin baru secara sah menurut aturan Republik ini. KPU, sekali lagi, ialah perangkat negara yang memiliki kewenangan melakukan proses penghitungan hasil suara dan mengesahkan hasil suara dengan berasaskan kepada aturan yang sudah ditentukan. Yang terpenting dilakukan semua komponen masyarakat ialah memberikan rasa percaya sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu. Semua masyarakat hendaknya bisa sabar dan menjaga diri agar semua proses pemilihan sesuai yang diharapkan.

Kalah atau menang dalam sebuah pesta demokrasi menjadi bagian yang bergerak dan saling menyempurnakan. Meski harus disadari, dalam pesta demokrasi kali ini, tidak ada tokoh pilihan rakyat Indonesia yang kalah atau menang. Semua yang sudah tampil dalam pesta demokrasi kali ini merupakan tokoh-tokoh nasional terbaik yang dimiliki bangsa. Jika hasil penghitungan sah dari KPU nanti menentukan siapa yang berhak menjadi presiden dan wakil presiden, mereka ialah pemimpin masyarakat Indonesia.

Proses pemilihan sudah tinggal berapa langkah lagi. Masyarakat Indonesia akan memiliki pemimpin baru yang dihasilkan dari proses

pemilihan secara langsung sehingga hasil pilihan tersebut harus dijaga sepenuh hati oleh masyarakat Indonesia. Gesekan, yang dalam beberapa pekan terakhir menguat, hendaknya ditiadakan sebab pesta sudah akan berakhir. Tiada guna mengumpat juga mengobarkan sentimen dan caci maki sebab antara satu masyarakat dan yang lain di Tanah Air ini merupakan main yang ditentukan dalam proses pemilihan. Kesatuan di tengah perbedaan jauh lebih penting dari kepentingan-kepentingan sepihak.

Pelajaran yang bisa diambil dan dihindarkan dari pemilu kali ini ialah, pertama, kesadaran untuk terlibat menyelesaikan. Informasi yang beredar, partisipasi pemilu pada Pemilu 2019 ini meningkat dari 2014. Angka ini semoga juga menjadi sinyal kesadaran masyarakat untuk selalu memantau perilaku pemimpin rakyat nanti. Praktik-praktik yang menyimpang dari amanah rakyat setidaknya tak pernah dilakukan para pemimpin yang sudah dipilih masyarakat.

Kedua, pemilu mengajarkan bangsa ini untuk menghargai pilihan berbeda. Perbedaan dalam bingkai NKRI menjadi lagu indah yang telah menambah wawasan keindonesiaan. Semakin berbeda, semakin kuat keinginan untuk meruwat dan mengikat rasa persaudaraan sesama dan setanan air sehingga apabila ada yang bertanya, siapa kita? Masyarakat akan bilang, Indonesia. Semoga momentum Pemilu 2019 ini menjadi salah satu jawaban bagi bangsa Indonesia untuk terus memperkuat nasionalisme dan pengabdian kepada Tanah Air. Wallahuallah bissawab.

Zaitur Rahem

Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep, Madura, Jawa Timur

Perlunya Menjaga Kedamaian seusai Pemilu

ADA yang menarik dari perhelatan Pemilu 17 April lalu, yaitu ada antusiasme masyarakat Indonesia untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara. Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali itu sungguh luar biasa. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menandakan kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Setiap pemilu pasti ada kemenangan dan kekalahan. Politisi yang menang dalam pemilu jangan berlebihan merayakannya, hormati pihak yang kalah tanpa merendahkan lawan. Para pendukung jangan merayakan berlebihan, seperti turun ke jalan yang bisa menyebabkan benturan yang tidak diinginkan terjadi.

Politisi yang gagal dalam pemilu juga harus berbesar hati dan ikhlas secara sportif. Mereka diharapkan bisa menenangkan para pendukung yang merasa kecewa atas hasil yang didapatkan. Jangan sampai mereka malah

bertindak anarkistis dengan cara melanggar hukum sebab bila hal itu dilakukan, masyarakat yang akan rugi.

Setelah pemilu selesai diadakan, saatnya menjadi momentum bagi masyarakat bersatu mengawal hasil yang akan menentukan pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Politisi yang bertarung dalam pemilu, baik yang menang atau yang kalah, diharapkan saling merangkul dan merajut kesatuan bersama-sama demi kemajuan bangsa. Para pendukung, baik yang kalah atau menang, menjaga iklim kondusif dan jangan terpancing provokasi. Semua elemen harus menciptakan suasana damai pascapemilu.

Taufan Azhar Fadila

Universitas Negeri Yogyakarta, Blunyahrejo TR/II 1167, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta,

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDO KORDSA Tbk**

Direksi PT Indo Kordsa Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Citeureup - Bogor, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : Mulia Hotel Jakarta, Narcisus Room, Mezzanine Level
Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270

Agenda Rapat:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
- Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Untuk mata acara Rapat ke-1 tentang pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2018 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018;
- Untuk mata acara Rapat ke-2 dan ke-3 akan diumumkan dan dibicarakan di dalam Rapat;
- Untuk mata acara Rapat ke-4, Perseroan akan mengusulkan besaran gaji dan tunjangan lainnya di dalam Rapat dan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jumlah total yang disetujui tersebut;
- Untuk mata acara Rapat ke-5, akan dibicarakan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 16:00 WIB.
- a. Para Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari website Perseroan (www.indokordsa.com) atau dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor 16810, atau di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

Biro Administrasi Efek
PT Edi Indonesia
Wisma SMR, 3rd Floor
Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350
Telepon: 021 6515130/6505829
Fax: 021 6515131

- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat akan diminta untuk menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku dan/atau surat kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa Salinan lengkap dari Anggaran Dasarnya beserta susunan pengurus terbaru dari Badan Hukum tersebut.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik akan tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS yang dapat diperoleh di Kantor Perseroan melalui permintaan tertulis oleh pemegang saham Perseroan atau dapat dilihat pada website Perseroan (www.indokordsa.com).
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbiayanya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Citeureup - Bogor, 22 April 2019
Direksi Perseroan

Tanggapan Editorial

Ideologi Mulai Tergerus
JANGAN hanya fokus pada infrastruktur melalui dong. Ideologi Pancasila mulai tergerus juga tuh.
@jazelsandrisky

Bekerja Lebih Baik
SEMOGA bermanfaat dan bekerja lebih baik lagi demi Indonesia yang lebih baik lagi.
Raphael Tunas Tumbelaka

Jangan seperti Orde Baru
JIKA DPR mayoritas dikuasai pemerintah, yang terjadi ialah ketidakseimbangan pengawasan. Jangan sampai seperti masa Orde Baru yang cuma yes saja.
@PertaminaGas

Semoga Allah Membimbing
SEMOGA Allah tetap membimbing pemimpin dan bangsa Indonesia dengan rida-Nya.
Bustomi Haryanto

Kawal Hasil Pemilu
KAWAL terus hasil Pemilu 2019 ini.
Ahmad Kailanimurad

Pemerintah Harus Mengatur
MANTAP, asalkan aparat pemerintah di daerah tidak rasialis. Di pusat ada Pak Jokowi yang 100% kami percaya nasionalis. Itu yang harus diatur oleh pemerintah pusat ke depannya.
Brobud

Lanjutkan Kerja Lagi
BRAVO pemerintah. Lanjutkan kerja, kerja, kerja, dan biarkan mereka yang sibuk berkoar-koar mengobarkan kebencian dan fitnah. Indonesia jaya rakyatnya makmur sejahtera.
Yusuf Soufi

Tunggu Hitungan KPU
SEBAIKNYA tunggu dulu hitungan dari KPU.
Amin Cz

Yang Penting Seimbang
KALAU pemerintah terlalu kuat dan DPR lemah, tidak bagus. Kalau DPR terlalu berkuasa, pemerintah lemah, makin kacau. Yang ada haruslah ada perimbangan antara kedua lembaga negara tersebut.
Abdul Haris

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan Pemegang Saham yang dibuat secara sirkulair, tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan PEMBUBARAN perseroan terbatas PT. MADINA ADI FARMA, berkedudukan di kota Padang.

Para pemegang saham menunjuk saudara HARRY BUDIMAN R, alamat Komp. Palimo Indah Blok S NO 01 RT003 RW006 kel. Cupak Tangah Kec Pahu Kota Padang selaku likuidator.

Bagi Pihak Ketiga perseroan yang memiliki hutang maupun piutang agar dapat menghubungi likuidator dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota Padang, 16 April 2019
PT. MADINA ADI FARMA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat Tahunan :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Persetujuan atas Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
- Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
- Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

Ketentuan Umum :

- Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan;
- Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 April 2019 pukul 16.15 WIB;
- Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR");
- Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
- (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas, paling lambat 7 hari sebelum Rapat.
- Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu idn.ccb.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan keterlibatan Rapat, Para Pemegang Saham/ Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 22 April 2019
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Direksi